

KAPASITAS PENGELOLAAN DESA WISATA RELIGIUS BONGO KABUPATEN GORONTALO

Yumanraya Noho
Alumni Magister Kajian Pariwisata
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstract

The study was conducted by using descriptive qualitative method, by focus on the questions; "How are the individual and organizational capacities level of managers in managing tourism village?" The data obtained through interview, observation, and documentation techniques to identify and describe the capacity of managers both the advantages and the shortcomings that could hinder the tourism village management.

The results showed that mostly of local managers are less of ability to show a high capacity in managing tourism. At the individual level there are sufficient capacities both in the aspect of awareness for pioneering the development of tourism potential and ability to grow the business souvenirs. But in the aspects of knowledge and understanding the concept of religious tourism, attraction management, and service towards tourists were lack and need to be improved. At organizational level, the managers have been able to establish a local non-governmental organization named PKBM Yotama that aimed to train and assist people in entrepreneurial and tourism activities. Unfortunately, these institutions have so many weaknesses in coordination system and showed a dominant leadership model by the founder of the institution in making variety rules and policies related to the management of tourism village. In the external partnerships aspect there were good ability of managers although there were still less amount of partners they have. Last, in promotional efforts, the managers were already able to promote their village through printed text, electronic and internet. Unfortunately they weren't able to expand the market to domestic and foreign tourists.

Keywords;

Individual Capacity, Organizational Capacity

Intisari

Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan fokus pertanyaan; bagaimana tingkat kapasitas individu dan organisasional pengelola dalam pengelolaan desa wisata? Data-data diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tingkat kemampuan pengelola baik kelebihan maupun kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat pengelolaan desa wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola lokal belum menunjukkan kapasitas yang tinggi dalam mengelola desa wisata. Pada level individual terdapat kapasitas yang cukup baik pada aspek kesadaran untuk merintis pengembangan potensi wisata dan kemampuan menumbuhkan usaha cinderamata. Tetapi masih terdapat banyak kekurangan dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep wisata religius, pengelolaan atraksi, dan pelayanan terhadap wisatawan, yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Pada level organisasional pengelola sudah mampu menumbuhkan sebuah lembaga swadaya lokal yakni PKBM Yotama yang secara bertujuan melatih dan mendampingi masyarakat dalam aktivitas wirausaha dan kepariwisataan. Sayangnya lembaga ini masih lemah dalam hal koordinasi akibat faktor kepemimpinan yang dominan dari pendiri lembaga dalam berbagai aturan dan kebijakan terkait pengelolaan desa wisata. Dalam aspek kemitraan eksternal terdapat kemampuan yang cukup baik dari pengelola. Hanya saja jaringan mitra desa ini masih terbatas jumlahnya. Terakhir dalam upaya promosi desa wisata, pengelola sudah memiliki kapasitas yang baik untuk menghasilkan saran promosi melalui media cetak, elektronik dan internet, tetapi belum didukung kemampuan untuk memperluas pasar wisatawan ke nusantara hingga mancanegara.

Kata Kunci:

Kapasitas Individu, Kapasitas Organisasi.

PENDAHULUAN

Sejak dikenalkan konsep desa wisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif, maka jumlah desa wisata khususnya di Indonesia mengalami peningkatan tajam bak jamur yang menyebar di berbagai pelosok tanah air. Jumlah tersebut mengacu pada data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

bahwa di tahun 2012 di Indonesia memiliki 978 desa wisata yang jumlahnya meningkat drastis dibanding tahun 2009 yang hanya tercatat 144 desa untuk tujuan pariwisata.

Optimisme yang memprovokasi terbentuknya desa-desa wisata umumnya berasal dari keyakinan bahwa potensi daya tarik yang dimiliki seperti alam, budaya, dan

tradisi masyarakat, mampu menarik minat sekelompok wisatawan baik domestik maupun internasional. Peluang tersebut muncul sejak terjadinya trend perubahan aspek psikografis dan demografis individu maupun sekelompok wisatawan di seluruh dunia yang bergeser meninggalkan jenis pariwisata konvensional yang sifatnya massal menuju jenis pariwisata alternatif yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Mowforth and Munt, 1998; Cooper and Hall, 2008; Fandeli, 2002; Damanik dan Weber, 2006).

Desa wisata religius Bongo adalah salah satu ratusan desa wisata yang telah terbentuk di Indonesia. Desa yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo ini diresmikan dengan SK Gubernur pada tanggal 9 Mei tahun 2004. Desa Bongo diresmikan dengan nama "Desa Wisata Religius". Pemilihan konsep "religius" adalah gagasan yang dirintis oleh Bapak Yosef Tahir Maruf berdasarkan daya tarik utamanya yakni tradisi budaya islami berupa perayaan "Walima" yang dilaksanakan setiap Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijiriah. Saat ini tradisi Walima telah ditetapkan sebagai *Calendar of Event* budaya pariwisata Provinsi Gorontalo. Di samping itu, desa ini menyimpan daya tarik alam perbukitan, pantai, dan beberapa peninggalan sejarah. Perpaduan daya tarik budaya religius islami, alam, dan sejarah ini menjadikan Desa Bongo memiliki keistimewaan dan menjadi salah satu desa sasaran pengembangan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Gorontalo.

Sebagai desa wisata yang sudah cukup lama terbentuk, seharusnya desa ini telah memasuki tahap kemandirian masyarakat untuk mengelola pariwisata di daerahnya. Kemajuan desa wisata dari segi fisik harus diimbangi dengan kapasitas yang memadai dari pengelola untuk menjalankan program-program desa wisata, sebab tingkat kapasitas pengelola yang rendah akan berpotensi menghambat kemajuan sebuah desa wisata.

Oleh karena itu isu mengenai kapasitas pengelola desa wisata ini kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk diidentifikasi. Kebutuhan tersebut berangkat dari identifikasi beberapa permasalahan terkait Desa wisata

religius Bongo yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, mayoritas penduduk Desa Bongo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Jenis pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kepariwisataan ini tentu saja memerlukan sebuah proses transformasi untuk mengelola pariwisata sebagai aktivitas baru bagi masyarakat. Dari pra-observasi yang dilakukan peneliti di tahun 2012 muncul persoalan ditinjau dari kapasitas atau kemampuan pengelola dalam mengelola pariwisata di Desa Bongo. Pengelolaan sektor pariwisata di desa ini masih sangat bergantung pada Bapak Yosef (perintis Desa wisata religius Bongo). Dirinya memiliki peran yang dominan dalam mengemukakan gagasan, implementasi program, bahkan mengeluarkan dana yang besar untuk membangun beberapa atraksi wisata buatan beserta sarana prasarana penunjang. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa komponen pengelola lainnya belum sepenuhnya memiliki kapasitas memadai untuk mengelola pariwisata di desa ini. Hal ini didukung dengan laporan tim Pendampingan PNPM Pariwisata 2013 yang menyebutkan bahwa masyarakat masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam manajemen desa wisata (Puspar UGM, 2013). Asumsi sementara tersebut perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi lebih dalam dengan menggunakan indikator-indikator kapasitas baik individual maupun organisasional dalam mengelola desa wisata.

Kedua, ketika menelusuri pustaka, hasil-hasil penelitian tentang desa wisata didominasi oleh obyek penelitian di desa-desa wisata kawasan barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini menyebabkan justifikasi terhadap kapasitas pengelolaan desa-desa wisata kawasan tengah dan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo agak terabaikan. Memang pada beberapa data dari pemerintah, kita dapat mengakses laporan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat misalkan saja pada laporan PNPM Pariwisata. Tetapi sering sekali ditemukan ketidakpuasan pada hasil evaluasi yang terkesan tidak secara detail memuat informasi tingkat kapasitas masyarakat setempat. Penyebabnya adalah proses evaluasi tersebut sarat dengan berbagai keterbatasan antara lain waktu dan biaya, serta berbagai persoalan politis lainnya yang dapat menurunkan tingkat keakuratan dan obyektivitas data. Di sisi lain,

analisis yang akurat dan obyektif sangat dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan desa wisata. Pemerintah harusnya menghindari pelaksanaan program peningkatan kapasitas masyarakat yang terkesan seragam untuk seluruh desa wisata di Indonesia, melainkan lebih kontekstual atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Demikian halnya dengan Desa wisata religius Bongo yang masih dalam tahapan berkembang. Masih sangat dibutuhkan sebuah penelitian yang secara substansial membahas tingkat kapasitas pengelola yang diharapkan dapat membantu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam menjalankan roda pariwisata di desa tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

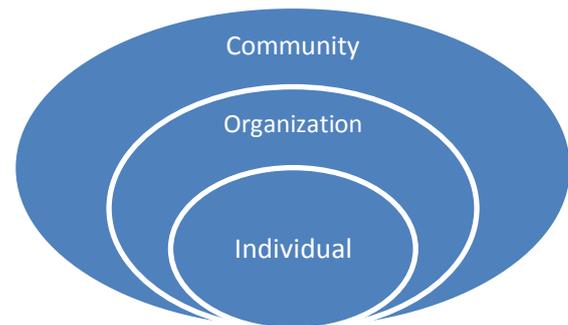
Uraian permasalahan diatas mengerucut pada substansi untuk meneliti tingkat kapasitas pengelola Desa wisata religius Bongo. Tujuan penelitian adalah: 1). Mengkaji dan mendeskripsikan tingkat kapasitas individual pengelola baik kelebihan yang dapat memajukan, maupun kekurangan yang dapat menghambat proses pengelolaan desa wisata; 2). Mengkaji dan mendeskripsikan tingkat kapasitas organisasional pengelola baik kelebihan yang dapat memajukan, maupun kekurangan yang dapat menghambat proses pengelolaan desa wisata.

LANDASAN TEORI

Konsep penelitian ini ditujukan pada kapasitas sumber daya manusia, sehingga diambil definisi bahwa kapasitas adalah level kemampuan, kompetensi, dan keahlian (Moscardo, 2008; Mubarak, 2010) individu, organisasi dan komunitas (Goodman, et.al, 1998 dalam Razzaq, et.al., 2012) untuk mengimplementasikan berbagai macam fungsi, mengelola keadaan secara kolektif, memecahkan aneka persoalan, dan merancang atau menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Smith, et.al, 2003). Definisi tersebut pada dasarnya mengandung tiga aspek yakni: (a) bahwa kapasitas merupakan kemampuan, (b) kemampuan tersebut berada pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, organisasi dan komunitas, dan (c) kapasitas diperlukan dalam sebuah proses untuk menjamin kesinambungan dan pencapaian tujuan. Razzaq, et.al. (2012) menambahkan bahwa kapasitas masyarakat adalah komponen penting yang harus

dibangun bahkan sebelum sebuah aktivitas atau program dimulai.

Goodman, et.al. (1998) menggambarkan tiga level kapasitas yang harus menjadi fokus analisis terhadap seseorang maupun organisasi. Ketiga level tersebut adalah: (a) level individu, (b) level organisasi/lembaga, dan (c) level masyarakat/sistem. Ketiga tingkatan ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Tingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. (Diadaptasi dari UNDP, 1998 oleh Goodman et al. (1998) dalam (Razzaq, et.al, 2012).

Tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui beberapa indikator. Dari konsep JICA, 2004 dalam Razzaq, et.al. (2012) indikator-indikator tersebut meliputi pengetahuan, keahlian/keterampilan, kesadaran dan sikap. Indikator-indikator serupa juga dikemukakan Kamariah, dkk. (2012) yakni: (1) *Knowledge*, yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan kerja, dan kesadaran diri. (2) *Ability* meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, evaluasi, kerja sama, mengatasi konflik, pemikiran intuitif, komunikasi, dan pengambilan keputusan (3) *Interest*, yang meliputi orientasi sikap, percaya diri, tanggung jawab, norma dan etika.

Berdasarkan indikator kapasitas individu yang diteorikan para ahli, maka peneliti mengambil beberapa indikator kontekstual dengan pengelolaan desa wisata. Indikator-indikator tersebut meliputi kesadaran dalam merintis pengembangan potensi wisata, pengetahuan tentang konsep desa wisata, keterampilan melayani wisatawan, keterampilan mengolah *souvenir* atau cinderamata, dan kemampuan mengelola atraksi wisata. Indikator-indikator ini merujuk pada penelitian Razzaq, et.al. (2012) sebab penelitiannya terkait kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata.

Milen (2006) menyebutkan bahwa tingkatan organisasi berhubungan dengan perangkat struktur, kultur dan pengelolaan organisasi yang mendukung para individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Djatmiko (2004) dalam Kamariah, dkk. (2012) juga menyebutkan aspek-aspek dalam level organisasi terdiri dari sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan. Sedangkan secara lebih spesifik ada yang menyebutkan tiga elemen kapasitas organisasional yakni: (a) *policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga, dan memberikan analisis terhadap keputusan. (b) *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas. (c) *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai (Polidano, 2000 dalam Kamariah, dkk., 2012). Komponen-komponen di atas sama dengan yang disebutkan Damanik dalam Teguh (2012) organisasi manajemen destinasi pariwisata, terdiri dari: 1). Kepemimpinan; 2). manajemen struktur organisasi; 3). kerjasama dan kemitraan; 4). pengembangan produk; 5). pemasaran dan promosi.

Mengingat penelitian ini dilakukan pada ranah pariwisata, maka indikator-indikator yang dirasa cocok untuk mengukur kemampuan dan kapasitas organisasional para pengelola desa wisata akan mengacu pada pendapat Damanik dan Teguh (2012). Penelitian akan mengidentifikasi apakah pengelola mampu menginisiasi pembentukan lembaga lokal, mampu memimpin dan berkoordinasi, melakukan kemitraan eksternal, mengembangkan produk-produk pariwisata, serta melakukan promosi destinasi wisata.

Tingkat kapasitas pengelola desa wisata secara individu maupun berorganisasi bisa saja sudah tergolong dalam kriteria matang jauh sebelum nama 'desa wisata' melekat di desa tersebut. Namun pada kondisi yang secara umum ditemui pada desa-desa wisata di Indonesia, tingkat kematangan kapasitas dalam mengelola kepariwisataan masih tergolong dibawah rata-rata. Bagi sebagian besar desa wisata pergeseran aktivitas utama di bidang pertanian atau kelautan yang kemudian menjadi tuan rumah bagi wisatawan adalah

tantangan tersendiri yang membutuhkan sebuah proses. Oleh karenanya keterlibatan unsur pengelola dalam segala bentuk aktivitas yang dapat meningkatkan kapasitas merupakan jaminan kematangan kapasitas individual maupun organisasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengkaji tingkat kapasitas pengelola lokal desa wisata religius Bongo. Data yang diperoleh adalah informasi dalam bentuk deskripsi kapasitas individual dan organisasional pengelola desa wisata. Peneliti merasa cocok untuk menggunakan pendekatan pemikiran dalam penelitian yang bersifat induktif yakni pendekatan yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang sesuai dengan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti.

Unit analisis dalam penelitian kualitatif ini adalah pengelola lokal desa wisata dan beberapa unsur *stakeholders* terkait. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan-informan terkait yang dianggap memiliki peluang dengan kriteria kepemilikan kompetensi dan keterlibatan dalam pengelolaan desa wisata Bongo. Informan tersebut terdiri dari ketua dan pengurus lembaga/ organisasi desa wisata ketua/Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bongo, pengrajin cinderamata dan pembuatan kuliner khas daerah, petugas di obyek wisata, pemandu wisata lokal, fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata Desa Bongo 2013, Tim Pendampingan PNPM Pariwisata 2013 wilayah Gorontalo, Kasie Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra Disbudpar Prov. Gorontalo, Kasie Pengembangan Produk, Sarana dan Prasarana Wisata Disbudpar Kab. Gorontalo, Kepala Desa (Kades) Bongo dan Bank Indonesia KPw Provinsi Gorontalo.

Teknik pengumpulan data melalui beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data melalui instrumen wawancara mendalam, observasi dan dokumen tertulis. Pada wawancara mendalam diawali dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Pertanyaan pendalaman digunakan untuk mendalami tanggapan atas

pertanyaan, meningkatkan kekayaan dari data yang diperoleh, dan memberi petunjuk pada yang diwawancarai tentang tingkat tanggapan yang diinginkan. Tahapan di atas dilakukan peneliti menjangkau informasi mengenai kapasitas pengelola desa wisata baik dari sisi individu maupun organisasional. Pada observasi, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat sebagai objek amatan dan bertindak sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi terutama menyangkut pengelolaan atraksi, pengolahan cinderamata, dan pelayanan wisata (*guiding* dan akomodasi *homestay*). Data hasil wawancara dan observasi didukung dengan dokumen sekunder berupa data tertulis atau gambar yang berisi mengenai data-data kependudukan, data-data rencana kegiatan dan jenis-jenis kegiatan yang pernah dilakukan, serta arsip-arsip lain yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa wisata religius Bongo khususnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas. Data-data yang dikumpulkan antara lain geografis desa, demografis penduduk, sejarah Desa Bongo, potensi pariwisata Desa Bongo, sarana prasarana, dan laporan PNPM Pariwisata (kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pariwisata Desa Bongo

Desa Bongo adalah bagian dari Kecamatan Batuda'a Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Secara geografis Desa Bongo terletak: 0°29'57.99" Lintang Selatan dan 123°02'0.90" Bujur Timur tepatnya pesisir selatan sebelah Timur yang berjarak ± 8 KM dari pusat Kota Gorontalo.

Desa ini berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Perjalanan dari pusat Kota Gorontalo bisa ditempuh dengan waktu ±20 menit menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Jalan yang berliku-liku dan melewati gunung di pesisir pantai Teluk Tomini merupakan daya tarik tersendiri yang bagi para pengunjung menuju perjalanannya ke Desa Bongo.

Salah satu jenis wisata yang saat ini digunakan sebagai tema di Desa Bongo adalah "Desa Wisata Religius". Terminologi "wisata religius" sebenarnya bukan sesuatu yang baru

dalam industri kepariwisataan. Wisata religius banyak dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, makam tokoh agama seperti ulama, atau situs-situs kuno yang memiliki sejarah tersendiri. Dalam pariwisata internasional, nama lain dari wisata ini sering disebut wisata pilgrim (*pilgrimage tourism* dan ada pula yang menyebutnya wisata spiritual (*spiritual tourism*).

Pembentukan Desa Bongo sebagai desa wisata yang berkonsep "Desa Wisata Religius" adalah ide yang digagas oleh Bapak Yosef Tahir Ma'ruf atau yang sering disingkat masyarakat dengan Bapak "Yotama". Melekatnya identitas religius yang dibangun Bapak Yotama bukan semata-mata karena sejarah Desa Bongo pada masa abad ke-17 yang diduduki kerajaan Islam. Penekanan identitas religius adalah sebuah upaya untuk memagari masyarakat agar menuju sebuah titik yang terarah. Dirinya memahami bahwa konsep pariwisata adalah sesuatu yang kompleks sehingga dibutuhkan sebuah tema yang menjadi menjadi fondasi untuk mengembangkan Desa Bongo. Konsep religius Islam menurutnya adalah konsep yang cocok untuk membangun kepariwisataan yang terintegrasi dengan norma-norma agama.

Implementasi dari konsep ini diantaranya mengangkat tradisi budaya Islam yang mengakar di masyarakat sebagai suatu daya tarik pariwisata yakni Perayaan Maulid Nabi yang saat ini telah dikemas dalam sebuah bentuk *event* Festival Walima.

Nama Walima (dalam bahasa Arab, berasal dari kata '*aulim*' yang diartikan oleh bahasa Persia. '*Kanduri*' dalam bahasa Indonesia '*Kenduri*' yang artinya adalah pesta makan setelah berdoa kepada Allah SWT) mulai memasyarakat di Desa Bongo pada tahun 1937. Walima merupakan bagian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Setiap tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Hijriah. Pada awalnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan di rumah-rumah penduduk karena sarana ibadah pada saat itu belum ada. Perayaan Maulid Nabi diadakan dalam bentuk dikili (zikir) dimulai setelah isya sampai jam 11 pagi atau sekitar 15-16 jam. Siangnya dilanjutkan dengan salawat dan doa kepada Nabi Muhammad SAW, serta memohon kepada Allah SWT semoga masyarakat Desa Bongo selalu dalam

lindungan-Nya dan dimurahkan rejeki, dijauhkan dari bencana. Pada akhir doa zikir pengunjung dan pezikir mendapatkan kue Walima. Tahun 1980-an perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah semakin meriah, warga yang ada diluar Desa Bongo bahkan yang ada diluar daerah Gorontalo turut merayakan doa Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Bongo. Satu minggu sebelum pelaksanaannya warga dari luar desa mulai berdatangan. Bagi warga yang tidak berkesempatan untuk menghadiri acara tersebut, hanya mengirim dana kepada keluarganya untuk dibuatkan Walima.

Desa Bongo telah ditetapkan pemerintah sebagai pusat Festival Walima se-provinsi Gorontalo sebagai upaya melestarikan budaya dan pariwisata, serta menjadi salah satu bagian identitas budaya nusantara Indonesia. Festival Walima dilaksanakan selama 2 tahun sekali yakni 2008, 2010, 2012, dan terakhir di 2014 yang kepanitiannya melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten, pengelola lokal, sponsor dari pihak swasta, dan masyarakat lokal. Keberhasilan Festival Walima setiap tahunnya terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai ribuan orang pada saat perayaan yang walaupun masih didominasi wisatawan lokal Gorontalo.

Selain menyuguhkan atraksi utama yakni *event* Festival Walima, desa wisata religius Bongo memiliki atraksi wisata alam dan buatan.

Bentuk-Bentuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Desa Bongo

Desa wisata religius Bongo telah menerima beberapa program peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu: *Pertama* yakni seminar yang dilakukan untuk memperkenalkan konsep pariwisata kontekstual dengan desa wisata, dan pelatihan yang membantu kemampuan (*skill*) individu sehingga terampil.

Program seminar dan pelatihan yang sudah pernah diimplementasikan bagi masyarakat desa wisata religius Bongo baik dari internal pengelola maupun eksternal terdiri dari bimbingan teknis pengelolaan daya tarik wisata oleh Kemenparekraf dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, pelatihan pengelolaan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Syariah Baitul Barokah, pelatihan dan usaha kreatif sebagai cinderamata, pelatihan produksi dan pemasaran *karawo* (tenun) oleh Bank Indonesia Cab. Gorontalo, pelatihan

kelompok usaha bersama kue *kolombengi* (khas Bongo), Kaderisasi *dikili* (zikir tradisional Gorontalo), *surunani*, dan *burudah* (syair tradisional) pelatihan *langga* (bela diri tradisional Gorontalo), pelatihan upacara-upacara adat Gorontalo oleh PKBM Yotama, pelatihan tarian tradisional Gorontalo, pelatihan penyusunan paket dan pemanduan wisata oleh SMK Pariwisata Bubohu.

Kedua, pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) pertama kali dibentuk pada tahun 2011 bersamaan dengan 11 desa wisata lainnya. Pada saat itu, ada 3 kelompok sadar wisata yang dibentuk terdiri dari kelompok *Walima*, *Kolombengi*, dan *Bubohu*. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 anggota yang pada waktu itu diikutsertakan pada seminar sadar wisata tahun 2011 dan 2012. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat.

Ketiga, PNPM Mandiri Pariwisata desa wisata religius Bongo memperoleh bantuan modal sebesar 75 juta rupiah yang ditujukan untuk pendanaan program fisik dan non fisik. Implementasi PNPM Pariwisata dalam bentuk non fisik berkaitan peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat di Desa wisata religius Bongo. Dari laporan PNPM pariwisata Desa wisata religius Bongo tahun 2013, sebagian bantuan modal diperuntukkan bagi fasilitasi alat dan pelatihan pembuatan cinderamata dari fosil kayu dan cinderamata walima. Kelompok masyarakat yang menerima pelatihan tersebut adalah kelompok "WALIMA" dengan bidang kegiatan fasilitasi pelatihan kerajinan tangan miniatur fosil kayu, fasilitas pelatihan kerajinan tangan cinderamata walima dan fasilitasi sarana pemeliharaan dan pembenahan taman wisata.

Kapasitas Individu Pengelola Desa Wisata

a. Kesadaran Merintis Pengembangan Potensi Wisata

Desa wisata religius Bongo memiliki potensi dan daya tarik wisata yang cukup beragam. Kekayaan potensi tersebut meliputi alam serta tradisi budaya masyarakat yang masih asli dan memiliki keunikan. Untuk menjadikan modal kekayaan potensi ini bermanfaat, maka dibutuhkan kesadaran (*awareness*) dari masyarakat untuk merintis pengembangan potensi sumber-sumber daya wisata yang dimiliki menjadi modal dalam menggerakkan roda pariwisata di desanya.

Kapasitas kesadaran untuk merintis

pengembangan potensi wisata yang dimiliki dapat diukur dari beberapa parameter. *Pertama* bahwa masyarakat harus mampu untuk mengenali atau mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis “potensi diri” apa saja yang tersedia dan unik di desanya. Hal ini merupakan langkah awal produktif untuk menginventarisir potensi yang akan dikembangkan. *Kedua*, kesadaran untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan atau program untuk mengembangkan potensi wisata tersebut menjadi atraksi wisata.

Bentuk-bentuk kesadaran yang mampu pengelola tunjukkan secara umum terdiri dari. *Pertama*, bahwa Provinsi Gorontalo masih kekurangan jenis daya tarik pariwisata yang berkualitas, sehingga potensi wisata yang ada di Desa wisata religius Bongo dapat mengisi kekosongan peluang tersebut. *Kedua*, Aktivitas dasar atau tradisi masyarakat dapat dijual apabila dikemas menjadi sebuah daya tarik yang sesuai bagi wisatawan. Contohnya adalah potensi tradisi Walima sebagai budaya lokal yang dapat dikemas menjadi sebuah *event* pariwisata. *Ketiga*, pengelola menyadari bahwa desa wisata harus mampu meyuguhkan keberagaman atraksi misalkan memadukan alam dan budaya agar kecenderungan atraksi yang monoton bagi wisatawan dapat terhindarkan. *Keempat*, pengelola menyadari bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa wisata religius Bongo merupakan alternatif untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat lokal. *Keempat*, daya tarik sebuah desa wisata harus didukung oleh penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas wisatawan selama berada di lokasi wisata. *Kelima* pengelola menyadari bahwa aktivitas pariwisata harus melibatkan peran semua unsur *stakeholder* termasuk pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata di Desa wisata religius Bongo.

Persoalan yang ditemukan di Desa wisata religius Bongo adalah belum terwujudnya kesadaran kolektif atau menyeluruh di masyarakat. Tingkat kesadaran yang mumpuni oleh pengelola belum mampu ditransfer ke kalangan masyarakat secara luas. Kesadaran tinggi hanya dimiliki oleh pengelola dan sebagian masyarakat yang bermukim di sekitar obyek wisata. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari dan pesimis terhadap potensi Desa Bongo yang dapat dikembangkan menjadi asset pariwisata. Hal ini juga dipicu rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang pariwisata, Akibatnya mereka tidak dapat mengambil sikap untuk terlibat terhadap pengembangan pariwisata.

b. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Konsep Wisata Religius

Ketika pariwisata mulai dikembangkan di dengan konsep “religius” di Desa Bongo maka masyarakat khususnya pengelola diharapkan mengetahui dan memahami konsep Desa Wisata yang dibalut kemasan religius.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai wisata religius akan mempengaruhi sikap pengelola dan masyarakat dalam menerima atau menolak konsep tersebut. Pada gilirannya mereka akan bertingkah untuk menjalankan roda pariwisata dengan konsep religius tersebut atau tidak. Pengetahuan dan pemahaman tentang wisata religius dapat diukur dari kemampuan mereka untuk menjelaskan pengertian konsep wisata religius berdasarkan pemaknaan terhadap wisata religius yang umumnya berlaku.

Pada awal diresmikannya Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religius, istilah religius masih asing dan kurang dipahami masyarakat setempat. Persoalan ini bermula dari minimnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang konsep wisata religius dan bagaimana implementasinya di lapangan. Masyarakat menganggap konsep wisata religius hanyalah keinginan individual dari Bapak Yosef sebagai pendiri Desa wisata religius Bongo. Masyarakat terkesan sebagai pelaku pasif yang pasrah menerima upaya pengembangan Desa Bongo dengan konsep yang tidak mereka pahami. Mereka menunjukkan ketidak siapan untuk menyanggah gelar tersebut dengan alasan kondisi masyarakat setempat masih jauh dari ketaatan terhadap agama.

Dari hasil wawancara pengelola rata-rata belum mampu menjelaskan dengan baik teori pengetahuan dan pemahaman tentang wisata religius sesuai ilmu pariwisata. Pengetahuan dan pemahaman mereka masih bersifat praktis berdasarkan apa yang disosialisasikan oleh Bapak Yosef sebagai pencetus konsep tersebut. Persoalannya adalah konsep yang disosialisasikan Bapak Yosef bukan lahir melalui sebuah analisis dan referensi yang mendalam. Bapak Yosef harusnya lebih hati-hati dan perlu mempertimbangkan rekomendasi dari ahli pariwisata untuk mencetuskan konsep wisata religius. Bisa jadi Desa wisata religius Bongo lebih cocok diberi nama “Desa Wisata

Budaya” dimana masyarakat Desa Bongo memiliki potensi budaya yakni tradisi islami turun temurun yakni perayaan Walima setiap Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika ditinjau kembali, sebenarnya Desa wisata religius Bongo belum secara utuh memenuhi indikator-indikator wisata religius islam yang berlaku secara universal.

c. Kemampuan Mengelola *Events* Festival Walima

Pengelolaan atraksi wisata berkaitan dengan proses yang terencana dan terkoordinasi untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya pariwisata untuk mendatangkan wisatawan di desa wisata melalui serangkaian tindakan terpadu. Dalam konteks pengelolaan atraksi Festival Walima, kemampuan pengelola dapat dinilai melalui serangkaian proses mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

Tahap perencanaan dimulai sebulan menjelang hari-H pelaksanaan. Pada dasarnya pengelola tidak menemui kesulitan untuk merencanakan pelaksanaan *events* Walima, sebab tradisi ini memang sudah turun temurun dilaksanakan setiap Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika tradisi Walima diangkat menjadi sebuah komoditas, maka pengelola membutuhkan kesiapan mental dan upaya yang lebih untuk menyuguhkannya menjadi sebuah atraksi wisata yang ditonton oleh banyak pengunjung dari luar desa. Oleh karena itu, pengelola menambahkan ide pelaksanaan tradisi secara kolosal yakni dengan mengundang atau melibatkan para pezikir dari berbagai wilayah di Gorontalo yang dilanjutkan dengan aktivitas parade kue khas Walima yakni *kolombengi* yang jumlahnya mencapai 500-700 ribu kue.

Pada tahap pengorganisasian dilakukan penentuan fungsi para pelaksana tugas. Sebelum pelaksanaan *event* dibentuk kepanitiaan khusus yang akan mengurus Festival Walima. Pada penyelenggaraan Festival Walima pertama di tahun 2008 panitia hanya terdiri dari tokoh-tokoh lokal Desa wisata religius Bongo yang sebagian besar adalah pengurus PKBM Yotama tanpa unsur pemerintah sama sekali.

Melalui kepanitiaan ini maka dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan Festival Walima sebagai berikut. Takmirul Masjid Masjid Ar-

Rahman, Al-Marif, Ar-Rum dan Masjid At-Taqwa bertugas untuk pelaksanaan proses zikir, Siswa dan Guru SMK Pariwisata Bubohu bertugas untuk pelaksanaan atraksi kesenian tradisional di taman wisata dan mengarak Parade kue-kue Walima, Kelompok Ibu-ibu anggota Masyarakat ditugaskan untuk pembuatan kue-kue Walima, Pengurus PKBM Yotama dibantu masyarakat berperan sebagai penanggung jawab umum teknis penyelenggaraan acara, dekorasi, sosialisasi *event* melalui promosi di media cetak dan elektronik, serta penyebaran undangan, Komunitas Masyarakat Fotografi Gorontalo (MFG) untuk dokumentasi festival.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan implementasi rencana program fisik maupun non fisik. Dari observasi yang dilakukan saat penyelenggaraan Festival Walima di tahun 2014, nampak bahwa mereka sudah menguasai alur pelaksanaan festival berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Secara fisik, panitia Festival Walima membuat dekorasi meliputi dekorasi hiasan janur di sepanjang jalan, dekorasi hiasan di masjid-masjid, spanduk, panggung, *sound system*, dsb. Sedangkan pada implementasi non fisik, Festival Walima dilaksanakan berdasarkan mekanisme cara dan waktu yang telah direncanakan. Tradisi Walima berupa proses *dikili* (zikir) oleh penduduk muslim di masjid dimulai setelah Sholat Isya (sekitar Jam 8 malam) sampai jam 11 pagi. Waktu pelaksanaan zikir berlangsung sangat panjang yakni sekitar 15-16 jam. Keesokan harinya dilakukan parade kue-kue Walima yang diarak dari masjid menuju lokasi perayaan Festival Walima.

Pada tahap evaluasi, nampak bahwa pelaksanaan Festival Walima kurang dievaluasi secara rutin. Dari sisi atraksi, ada kesan monoton akibat kurangnya inisiatif pengelola untuk menyuguhkan variasi atraksi yang berbeda dari tahun ke tahun. Beberapa variasi atraksi yang mampu ditambahkan panitia ke dalam *event* tersebut adalah tari-tarian tradisional yang melibatkan siswa-siswi SMK Pariwisata. Persoalannya adalah jenis tari tradisional yang ditampilkan pada saat perayaan Festival Walima adalah tari-tarian yang pada umumnya yang sudah sering ditampilkan di wilayah lain Gorontalo. Atraksi kesenian tersebut antara lain tari Tidi, Saronde, Langga, dsb. Pengelola harusnya menyajikan sesuatu yang unik dan memiliki signifikansi

perbedaan dengan apa yang ditampilkan di wilayah daerah Gorontalo lainnya. Improvisasi atraksi harus menjadi perhatian pengelola agar kunjungan wisatawan akan konsisten bahkan meningkat di tahun-tahun berikut. melalui strategi tersebut *gap* antara ekspektasi yang tinggi dari wisatawan dan minimnya kapasitas masyarakat untuk memenuhi permintaan dapat teratasi.

d. Kemampuan Usaha Cenderamata

Dalam hal usaha cenderamata Bapak Yosef Tahir Maruf menginisiasi berdirinya sebuah gerai cenderamata yang dinamakan “Yotama Art Gallery” di tahun 2011. Gerai ini disiapkan pengelola sebagai wadah untuk menampung kreativitas masyarakat dalam membuat kerajinan. Persoalan yang muncul di awal peresmian gerai ini adalah kurangnya kemampuan pengelola untuk menampilkan kerajinan asli yang diproduksi masyarakat lokal. Contohnya saja dengan dijualnya “miniatur Walima” dari bahan fiber yang justru masih disuplai dari Yogyakarta untuk dipajang atau dijual kembali di gerai tersebut. Barang lain yang dijual adalah *karawo* (kain tenun Gorontalo). Berbeda dengan miniatur Walima yang masih disuplai dari daerah lain, kain *karawo* adalah hasil kerajinan asli dari ibu-ibu di Desa Bongo. Tetapi pengelola tampak kurang jeli melihat pasar. Kain *karawo* di Desa Bongo sudah jelas kurang laku untuk dijual, sebab kain *karawo* bukanlah sesuatu yang langka. Kain *karawo* merupakan kain tenun yang banyak ditemukan di wilayah Gorontalo lainnya dengan kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang kompetitif.

Kasus yang sama terjadi hampir pada seluruh *souvenir* lainnya seperti kipas *karawo*, kaos dengan sablon, bunga sinetron (bunga yang dipasang pada ukiran akar pohon) dan beberapa kue tradisional Gorontalo *kolombengi*. Hasil-hasil kerajinan tersebut rata-rata sepi peminat disebabkan rendahnya kapasitas pengelola untuk menstimulasi pengrajin dalam menghasilkan barang berkualitas dan memiliki nilai “kelangkaan” yang biasanya diincar wisatawan.

Produksi cenderamata mulai terbantu dengan masuknya PNPM Pariwisata di tahun 2013. Masyarakat difasilitasi alat dan bahan serta pelatihan pembuatan cenderamata dengan alokasi dana sebesar 16 juta rupiah. Beberapa kerajinan yang dihasilkan pengrajin lokal di Desa Wisata Bongo Religius dari bantuan

PNPM Mandiri adalah miniatur fosil kayu, gantungan kunci wombohe, gantungan kunci walima dan gantungan kunci fosil kayu.

Di sisi lain bantuan PNPM Mandiri Pariwisata belum sepenuhnya menuntaskan persoalan produksi dan pemasaran cenderamata. Dari data yang dikumpulkan peneliti ada beberapa kendala yang menghambat perkembangan usaha cenderamata di Desa wisata religius Bongo. *Pertama*, kendala keterbatasan jumlah dan kualitas alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan. Keterbatasan kuantitas dan kualitas alat yang digunakan berdampak pada cenderamata yang jumlahnya terbatas dan kurang variatif dari segi tampilan bentuk dan warna. Kendala *kedua* adalah masalah pemasaran hasil produksi cenderamata. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan di desa ini berbanding terbalik dengan penjualan cenderamata yang rendah. Dari hasil pengamatan peneliti menemukan galeri cenderamata tidak beroperasi alias ditutup. Beberapa cenderamata terpaksa dipajang di warung makanan.

e. Pelayanan terhadap Wisatawan

Bagi sebuah desa wisata, pelayanan prima wisatawan adalah faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan kunjungan. Dewasa ini persaingan desa wisata semakin ketat, bagi desa wisata yang mampu berkembang dan merawat konsumen (wisatawan), biasanya bertahan dalam persaingan yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan yang terus meningkat. Pelayanan kepada wisatawan yang penting untuk dibahas meliputi pemanduan wisata (*guiding*) dan layanan akomodasi (*homestay*).

Untuk memenuhi kebutuhan pemandu wisata di Desa wisata religius Bongo, pengelola membentuk sebuah SMK Pariwisata. Namun siswa-siswa tersebut kurang diberdayakan dan belum cukup siap secara pengetahuan dan mental. Dari hasil observasi, para wisatawan banyak dibiarkan saja lalu lalang mengelilingi areal taman wisata tanpa ada yang mendampingi. Mereka terlihat bingung dan harus bertanya-tanya kepada masyarakat yang kebetulan lewat untuk menunjukkan titik-titik obyek wisata. Masyarakat sekitar hanya sebatas memberi tahu tanpa menawarkan diri untuk menemani pengunjung berkeliling. Pendampingan hanya akan dilakukan bila ada tamu-tamu penting seperti pejabat, wisnus dari luar Gorontalo, maupun wisman yang biasanya

sudah memiliki *guide* khusus dari luar Desa Bongo.

Persoalan berikut yakni masalah ekomodasi. Walaupun sudah diresmikan sejak tahun 2004, faktanya Desa wisata religius Bongo belum memiliki akomodasi penginapan khususnya dalam bentuk *homestay* layaknya desa-desa wisata lainnya di Indonesia. Belum adanya *homestay* di desa ini bukan disebabkan tidak adanya permintaan wisatawan untuk menginap, tetapi cenderung disebabkan ketidak siapan pengelola dalam mengakomodir masyarakat untuk mempersiapkan rumah-rumahnya sebagai *homestay*.

Bedasarkan kondisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas peneglola dalam hal pelayanan masih rendah dan membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk mempersiapkan personil yang mampu memandu wisata dan melayani akomodasi.

Kapasitas Pengelola Desa Wisata

a. Kemampuan Pendirian Organisasi Pengelola Desa Wisata

Dalam mengelola pariwisata, pengelola Desa wisata religius Bongo mampu mendirikan sebuah lembaga kemasyarakatan yakni PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mandiri) YOTAMA. PKBM Yotama sifatnya adalah lembaga yang berkonsentrasi pada pendidikan non formal atau dikategorikan sebagai LSM di bawah Dinas pendidikan. Dalam aturan Kementerian Pendidikan kepanjangan nama PKBM yang seharusnya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, namun pengurus PKBM mengganti kata “Masyarakat” menjadi “Mandiri”. Ini adalah inisiatif pengurus sebagai upaya menunjukkan ciri kemandirian lembaga yang tidak ingin segala aktivitasnya bergantung pada APBD, atau dengan kata lain menjalankan lembaganya secara swadaya. Ada keinginan kuat dari pengelola untuk menunjukkan kesungguhan mereka dalam membangun Desa Bongo. Walaupun demikian hal ini bukanlah sesuatu yang berujung penolakan terhadap pemerintah, namun mereka menginginkan agar ke depannya pemerintah dapat mempromosikan desa ini sebagai desa wisata religius yang benar-benar lahir dari ide dan gagasan masyarakat lokal (*bottom-up*) bukan ditentukan oleh pemerintah (*top-down*).

PKBM YOTAMA didirikan sebagai lembaga yang mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup yang lebih

baik. Pendampingan PKBM YOTAMA meliputi pendidikan, pelatihan, ekonomi kreatif, industri rumah tangga, pertanian, religius, dan Pariwisata. PKBM YOTAMA memiliki visi untuk terbinanya masyarakat berdaya, mandiri, dan unggul dengan berlandaskan pada kearifan lokal, budaya, dan religius. PKBM Yotama adalah lembaga yang memiliki peranan dalam pembentukan hingga penyelenggaraan berbagai program di Desa wisata religius Bongo.

b. Kepemimpinan dan Koordinasi

Untuk memenuhi peran dan kapasitas sebagai pemimpin sebaiknya diisi oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman tinggi. Dalam konteks Desa wisata religius Bongo, sosok yang tampil sebagai pemimpin dengan porsi kewenangan paling besar dalam berbagai aturan dan kebijakan pengelolaan adalah Bapak Yosef Tahir Maruf. Ciri sebagai *leader* mampu ditunjukkan Bapak Yosef dari sisi keberanian, pengalaman organisasi, eksistensi, dan dukungan *financial* yang tinggi untuk mewujudkan idenya membangun Desa wisata religius Bongo. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan pembentukan desa wisata mulai dari rekonstruksi sejarah, mendirikan lembaga pengelola desa wisata, pembangunan fasilitas atraksi, penyelenggaraan Festival Walima, menggalang kerjasama dengan pihak eksternal, hingga upaya promosi melalui media cetak dan elektronik.

Parameter berikut yang dapat memenuhi kapasitas seseorang sebagai pimpinan adalah dapat memotivasi dan memberdayakan bawahan. Kepemimpinan yang efektif sangat mempengaruhi anggota organisasi untuk pencapaian tugas dan fungsi organisasi. PKBM Yotama yang bergerak sebagai lembaga non profit tentu membutuhkan elemen pengurus yang memiliki jiwa “relawan” untuk menjalankan program dengan berbagai keterbatasan utamanya dalam hal keterbatasan modal. Aturan yang dibuat Bapak Yosef untuk tidak memberlakukan retribusi apapun di setiap obyek wisata, menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus PKBM dalam mengelola pariwisata di Desa wisata religius Bongo. Oleh karena itu, Bapak Yosef memotivasi pengurus agar mampu menunjukkan pengabdian terlebih dahulu dalam mengelola pariwisata di Desa Bongo.

Pengelola desa wisata diharapkan dapat melaksanakan segala sesuatu berdasarkan

spirit pengabdian seperti pada budaya “Walima”. Dalam budaya Walima, masyarakat ingin mempersembahkan sesuatu untuk nabi yang dicintai, tanpa mengharapkan imbalan. Begitu juga spirit yang ditanamkan bagi pengelola, apabila mereka. Maka kami sudah masuk kepada konsep spiritualitas. Konsep pembangunan berbasis spiritualitas. Semua menggunakan logo walima.

Di awal perkembangan pariwisata Desa Bongo, dominasi peran Bapak Yosef tidak terlalu dipermasalahakan oleh masyarakat lokal. Ada semacam paradigma bahwa desa ini tidak akan ada apa-apanya tanpa rintisan Bapak Yosef. Namun lama-kelamaan dominasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, bahwa kesan Bapak Yosef sebagai “penguasa” cenderung muncul dan meminimalkan peran masyarakat lokal yang seharusnya lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Sudut pandang pengelola dan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Yosef masih terbingkai dengan pandang positif maupun negatif. Seiring bergulirnya waktu, porsi campur tangan Bapak Yosef memang harus dikurangi. Pengelola lokal dan komponen masyarakat lokal harus bisa menumbuhkan inisiatif dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk wisata tanpa menunggu ide-ide yang semuanya berasal dari Bapak Yosef.

Persoalan berikutnya yang muncul dalam roda organisasi adalah rendahnya intensitas pelaksanaan musyawarah. Intensitas rapat baru tinggi menjelang adanya tamu, khususnya pada *event* Festival Walima. Pengelola desa wisata religius Bongo kurang menyadari pentingnya pelaksanaan pertemuan rutin yang seharusnya dapat merefleksikan atau mengevaluasi kinerja Desa Wisata. Idealnya pertemuan atau rapat dapat dilaksanakan minimal sebulan sekali untuk mendapatkan evaluasi yang komprehensif tentang aktivitas kepariwisataan di Desa wisata religius Bongo. Pelaksanaan rapat oleh pengelola yang tidak terjadwal dan bahkan baru dilaksanakan setelah beberapa tahun. Rendahnya intensitas pelaksanaan musyawarah untuk menjalankan program Desa.

Koordinasi melalui rapat-rapat atau pertemuan harus ditingkatkan intensitasnya. Sebab persoalan rendahnya koordinasi melalui rapat di desa ini telah menimbulkan berbagai persoalan. *Pertama*, pengelola Desa wisata religius Bongo hanya melakukan upaya sebatas

penghitungan jumlah kunjungan wisatawan per bulannya. Pengelola tidak mengevaluasi kinerjanya dalam hal pemenuhan layanan bagi wisatawan. Akibatnya terdapat fluktuasi kunjungan wisatawan yang naik turun tanpa sebuah refleksi yang jelas apakah fluktuasi tersebut terkait rendahnya kualitas atraksi atau bisa jadi mutu layanan yang kurang memuaskan bagi wisatawan. *Kedua*, pengelola kurang melakukan penghitungan besaran manfaat pariwisata yang diterima masyarakat. Hal ini menyulitkan analisis kepastian tinggi atau rendahnya dampak secara ekonomi yang diterima masyarakat dari adanya aktivitas kepariwisataan di Desa wisata religius Bongo. *Ketiga*, minimnya *feedback* dari anggota masyarakat yang menghasilkan rekomendasi pengembangan desa wisata religius Bongo. Padahal kebutuhan rekomendasi ini diharapkan bisa muncul apabila pengelola melaksanakan rapat evaluasi rutin melibatkan pengurus dan anggota masyarakat.

c. Kemitraan Eksternal

Salah satu indikator yang menentukan kapasitas organisasional pengelola desa wisata adalah kemampuannya menjalin kemitraan dengan pihak-pihak eksternal. Tak dapat dipungkiri bahwa dibalik modal keswadayaan pengelola melalui Lembaga PKBM Yotama, Desa wisata religius Bongo masih membutuhkan sentuhan berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dengan menunggu uluran tangan pemerintah yang selalu beralih dengan keterbatasan anggaran. Kegigihan yang ditunjukkan pengelola di bawah kepemimpinan Bapak Yosef Tahir Maruf untuk memajukan sektor pariwisata Desa Bongo akhirnya dilirik KPw Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo. Tahun 2011 KPw BI membidik Desa Bongo sebagai penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang dikemas dalam bentuk program pengembangan desa wisata.

Mekanisme kemitraan program BI dengan Desa wisata religius Bongo dimulai dengan pertemuan dengan pengelola PKBM Yotama, Kepala Desa, dan masyarakat. Pihak BI menyadari adanya eksistensi PKBM yang juga memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat di Desa Bongo. Oleh karena itu pihak BI mencari celah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari segi pemberdayaan masyarakat yang belum sepenuhnya

diakomodir oleh PKBM Yotama. Beberapa program PSBI yang telah dilaksanakan sejak 2011-2013 terdiri dari penghijauan lingkungan desa, bantuan pembangunan Masjid Walima Emas, pelatihan budidaya ikan lele, pelatihan budidaya rumput laut (JRL), pelatihan desain *karawo*, pembentukan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Syariah, pelatihan pengelolaan LKM, pembuatan sekretariat LKM, bantuan komputer kepada LKM dan SMK Pariwisata, bantuan mesin *katinting* konversi bahan bakar gas (BBG), pelatihan menjahit tingkat dasar dan terampil, pelatihan korespondensi bisni dan ekspedisi, pelatihan pembuatan website untuk kelompok pengraji *karawo*, mengikutsertakan pengrajin *karawo* dalam berbagai pameran UMKM, pembuatan gerai *karawo* “Walimah”, dan pelatihan pengolahan usaha gerai *karawo* (Bank Indonesia KPw Gorontalo, 2014).

Masuknya program PSBI di Desa wisata religius Bongo tidak mengecilkan peran PKBM Yotama sebagai lembaga lokal yang mengangani pemberdayaan masyarakat. Pengelola justru menunjukkan sikap terbuka untuk bekerjasama dalam implementasi program dari pihak BI. Dalam pelaksanaannya pengelola menyebutkan bahwa program yang datang dari pihak BI biasanya langsung ditangani kepanitiannya oleh yang bersangkutan dengan melibatkan fungsi pengelola lokal desa wisata sebagai pendamping.

d. Kemampuan Mempromosikan Desa Wisata

Dari data yang diperoleh, kapasitas pengelola untuk melakukan promosi demi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa wisata religius Bongo cukup baik. Upaya promosi ditangani langsung oleh PKBM Yotama. Sejauh ini pengelola belum mendapatkan semacam pelatihan secara khusus terkait promosi Desa Wisata, namun pengelola melakukan upaya-upaya strategis untuk mendatangkan wisatawan ke desanya. Upaya-upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama* yakni membentuk wadah khusus yang bernama “Yotama Multimedia”. Yotama Multimedia dibantu oleh beberapa relawan yang merupakan para pekerja media televisi lokal untuk menghasilkan sarana promosi berupa *booklet*, brosur, video dan gambar yang dipromosikan melalui internet (*blog*, *social media*, *youtube*). Pengelola juga

dibantu oleh sebuah komunitas fotografi yakni Masyarakat Fotografi Gorontalo (MFG) yang secara sukarela mendokumentasikan atraksi wisata di Desa Bongo yang mereka promosikan melalui halaman *social media*.

Kedua, bentuk promosi melalui penyelenggaraan agenda kebudayaan di kawasan wisata. Berbagai destinasi pariwisata telah membuktikan bahwa daya tarik pariwisata budaya dalam bentuk *event* terbukti sangat kuat untuk menyedot atensi kunjungan wisatawan, sebab sebuah *event* menyajikan ritual budaya dan tradisi masyarakat lokal memiliki faktor perbedaan untuk memenuhi pencarian produk wisata yang unik dan beragam dengan mutu tinggi (Damanik, 2013). Hal tersebut disadari dan diimplementasikan pengelola dengan mengemas tradisi budaya islami perayaan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Hijiriah menjadi sebuah agenda yakni “Festival Walima”. Upaya promosi ini terbilang paling efektif sebab dari tahun ke tahun kunjungan pada saat Perayaan Festival Walima meningkat hingga menembus angka 15 ribu pengunjung di tahun 2014.

Namun begitu keberhasilan Festival Walima masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. *Pertama*, pengelola masih memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Festival Walima. Walaupun sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan menjadi bagian *calendar of event* pariwisata Provinsi Gorontalo, namun pelaksanaan Festival Walima terpaksa masih dilakukan dalam kurun 2 tahun sekali. Jika demikian dampak dari penyelenggaraan *event* pun harus menunggu waktu yang agak lama. Ke depan diharapkan Festival Walima bisa rutin dilaksanakan setahun sekali, agar pergerakan pariwisata yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat bisa meningkat secara konsisten. *Kedua*, jenis wisatawan yang hadir pada saat Festival Walima masih didominasi oleh wisatawan lokal dari Gorontalo. Promosi yang menjangkau wisatawan nusantara dari luar Gorontalo hingga mancanegara belum terealisasi hingga saat ini. Upaya bantuan promosi yang dilakukan pemerintah belum bisa diharapkan sepenuhnya untuk membidik pasar wisatawan nusantara dan mancanegara. Oleh karena itu pengelola harus lebih giat melakukan kerjasama dengan pihak swasta seperti biro perjalanan dan destinasi wisata terdekat Gorontalo.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kapasitas Individual Pengelola

- 1) Pengelola sudah memiliki kemampuan mengenali jenis potensi wisata dan menginisiasi aksi untuk mengembangkan potensi tersebut.
- 2) Aspek pengetahuan dan pemahaman pengelola tentang konsep wisata religius masih terbilang rendah dan kurang sesuai dengan teori ilmu pariwisata.
- 3) Kemampuan mengelola *events* Festival Walima sudah cukup baik. Utamanya kemampuan dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan. Minimnya kapasitas pengelola nampak pada tahap evaluasi, dimana penyuguhan atraksi terkesan monoton atau kurang variatif dari tahun ke tahun.
- 4) Kapasitas pengelola dalam mengolah cinderamata sudah cukup baik. Mereka mampu menginisiatif pendirian sebuah gerai cinderamata. Persoalannya terdapat pada kualitas cinderamata dan kemampuan memasarkannya.
- 5) Kapasitas pengelola dalam menyiapkan pelayanan terhadap wisatawan masih kurang memadai dimana pengelola belum mampu memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga pemandu wisata dan menyiapkan akomodasi berupa *homestay* layaknya desa-desa wisata lain.

b. Kapasitas Organisasional Pengelola

- 1) Kemampuan pengelola dalam menginisiasi pembentukan lembaga lokal yang mengurus pariwisata di Desa Bongo sangat baik. Mereka memiliki lembaga bernama PKBM Yotama yang mampu melatih, membimbing, dan mendampingi masyarakat sehingga berdaya dan memperoleh manfaat dari sumberdaya pariwisata di desanya.
- 2) Kepemimpinan dalam pengelolaan desa Bongo nampak kurang baik. Terjadi dominasi ide-ide kebijakan pengembangan desa wisata oleh Bapak Yosef selaku pendiri dan pembina PKBM Yotama. Hal ini

berdampak pada rendahnya intensitas pelaksanaan rapat organisasi secara rutin. Masyarakat menjadi pasif dalam menginisiasi ide-ide dan hanya bersifat menunggu untuk setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan di Desa Bongo.

- 3) Dalam hal menjalin kemitraan, kapasitas pengelola cukup baik. Pengelola dan pihak BI melakukan koordinasi yang baik dalam melaksanakan program. Untuk menghindari tumpang tindih program, pihak BI melibatkan diri untuk mengambil alih program yang belum dilakukan oleh PKBM Yotama.
- 4) Dalam hal promosi desa wisata, kapasitas pengelola sudah cukup memadai. Penyelenggaraan *event* budaya Festival Walima merupakan alat promosi paling ampuh yang mampu mendatangkan belasan ribu pengunjung ke Desa wisata religius Bongo.

REKOMENDASI

a. Bagi Peningkatan Kapasitas Individual

- 1) Kesadaran untuk merintis pengembangan potensi wisata perlu ditingkatkan melalui seminar sadar wisata, *Focus Group Discussion*, atau kegiatan sejenis lainnya. Selain itu, pengelola diharapkan lebih aktif atau giat untuk mentransfer dan mewujudkan kesadaran secara kolektif di masyarakat.
- 2) Perihal pengetahuan dan pemahaman pengelola tentang konsep wisata religius, dibutuhkan sosialisasi melalui seminar dan pelatihan pariwisata berbasis masyarakat yang kontekstual dengan jenis wisata religius. Konsep wisata religius yang dipraktekkan pengelola juga perlu ditinjau dan dikaji kembali, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam implementasinya.
- 3) Dalam pengelolaan *event* Festival Walima, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola agar mampu berimprovisasi dalam mengemas *event* tersebut menjadi lebih variatif,

alias menghindari jenis atraksi yang cenderung monoton bagi wisatawan.

- 4) Perihal pengolahan cinderamata, dibutuhkan bantuan alat kerajinan yang lebih canggih untuk mendorong pengrajin memproduksi cinderamata yang lebih berkualitas dan beragam. Selain itu, dibutuhkan upaya intensif pemerintah dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam memasarkan cinderamata.
- 5) Dalam hal pelayanan wisata diperlukan *pertama*, peningkatan tanggung jawab pengelola untuk mempersiapkan pemandu wisata yang selalu tersedia di lokasi wisata. *Kedua*, pembekalan modal keberanian dan percaya diri kepada pemandu wisata. *Ketiga* pelatihan tentang pengelolaan akomodasi (*homestay*) bagi masyarakat agar Desa wisata religius Bongo dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin menginap.

b) Bagi Peningkatan Kapasitas Organisasional

- 1) Dalam hal kepemimpinan dan koordinasi *pertama* dibutuhkan pelatihan dan kaderisasi kepemimpinan bagi anggota pengelola lainnya untuk menghindari ketergantungan kepada pimpinan saat ini dalam menjalankan roda organisasi. *Kedua*, diperlukan peningkatan kesadaran dan kinerja pengelola untuk melaksanakan rapat/pertemuan yang intensif dan terjadwal setiap bulannya agar koordinasi antar pengelola di desa wisata menjadi lebih aktif.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelola untuk menjaring mitra-mitra lainnya seperti destinasi wisata terdekat, biro perjalanan (*travel agent*), hotel, restoran, dsb.
- 3) Pelatihan promosi desa wisata bagi segmen wisatawan yang lebih luas hingga nusantara dan mancanegara dibarengi pelatihan penyusunan paket-paket wisata untuk bahan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

-(2009). (Re-)creating Urban Destination Image: Opinions of Foreign Visitors to South Africa on Safety and Security?. *Urban Forum*. (feb) 20:1–18
- Damanik, J dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Donaldson, R dan Ferreira, S .2007. Crime, Perceptions and Touristic Decision making: Some Empirical Evidence and Prospects for the 2010 World Cup. *Politikon*. (Dec), 34(3), 353–371
- Drumm Andy, Moore Alan, 2004. *Ecotourism Development, Vol II, The Buseniss of Ecotourism Development and Management*. USAID-UNDP
- Drumm Andy, Moore Alan, 2005. *Ecotourism Development Vol I, An Introduction to Ecotourism Planning Second Edition*, USAID-UNDP
- Fleischer, A dan Buccola, S. 2006. *War, Terror, and the Tourism Market in Israel*. dalam Mansfeld dan Pizam. 2006. *Tourism Security and Safety: From Theory to Practice*. Elsevier.Oxford. Pp.49-65
- Lokal Government Association, 2007. *Communities and Lokal Government an Action Plan for Community Empowerment; Building on Success*. Bresenden Place London.
- Lumpkin Tara, 1998. *Community Based Ecotourism in the Panama Canal Watershed*. WorldWID Fellow, USA for International Development/ Panama with the support of the National Environmental Commission.